

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu dari Penty Gustikasari (*Program S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 2014*) dengan judul “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Masyarakat Desa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga petani yang telah mengalihfungsikan lahan pertaniannya mengalami peningkatan, di tunjukkan dengan tindakan petani atau pemilik lahan dengan membangun rumah yang nyaman untuk kehidupan, kosan, kontrakan, dan usaha lainnya diatas tanah bekas pertanian yang mereka miliki, yang mana dengan mengalih fungsikan lahan pertanian ke non-pertanian yang di lakukan memberikan dampak pada kehidupan rumah tangga masyarakatnya. Perubahan status ekonomi para pemilik lahan ini mengakibatkan peningkatan pendapatan perbulan dan pertahun, namun status sosial para petani tidak mengalami pergeseran. Alih fungsi lahan pertanian juga berdampak negatif pada perubahan lingkungan sosial masyarakatnya yang mengakibatkan munculnya golongan-golongan baru dalam masyarakat Desa Landungsari.<sup>6</sup>

Penelitian kedua dari Rifal Laksmna (*Program S1 Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut*

---

<sup>6</sup> Penty Gustikasari. 2014. Skripsi: *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Masyarakat Desa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang

*Pertanian Bogor*) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kemandirian Pangan Di Kabupaten Subang.” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: <sup>7</sup>

1. Alih fungsi lahan di Kabupaten subang mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Periode tahun 2003-2012, luas sawah cenderung menurun dengan rata-rata laju alih fungsi lahan sawah sebesar -0,057 persen atau sekitar 169 hektar. Alih fungsi lahan terbesar yakni terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 723 hektar. Alih fungsi lahan ini terjadi karena peningkatan pembangunan pemukiman penduduk dan pembangunan industri.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya alih sungsi lahan pertanian di Kabupaten Subang pada skala makro yaitu jumlah perumahan rakyat dan jumlah industri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pada skala mikro yaitu luas lahan dan pendapatan usaha tani. Alih fungsi lahan di Kabupaten Subang dipengaruhi secara signifikan oleh harga lahan sesuai dengan penelitian dengan menggunakan Metode Korelasi Pearson bahwa, semakin meningkatnya harga lahan maka semakin meningkat pula lahan yang dijual dan dialihfungsikan oleh petani.
3. Alih fungsi lahan menyebabkan adanya perubahan rata-rata pendapatan total petani sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp. 1.090.762. Selain pendapatan yang menurun, peteni juga mengalami penurunan produksi padi. Produksi gabah yang hilang selama sepuluh tahun dari tahun 2003 hingga 2012 adalah sebesar 231.241 ton atau

---

<sup>7</sup> Rifal Laksmana. 2015. Skripsi: *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kemandirian Pangan Di Kabupaten Subang*. Institut Pertanian Bogor. Hal: 73

nilainya sekitar Rp. 1.017.460.400.000. Hasil simulasi ketahanan pangan di Kabupaten Subang, yaitu pada 2100 Kabupaten Subang tidak dapat memenuhi kebutuhan berasnya, dimana akan terjadi kekurangan beras sebesar 2.773 ton.

4. Implikasi kebijakan untuk mengatasi alih fungsi lahan sawah dapat dilakukan dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, contohnya penyuluhan mengenai Keluarga Berencana (KB), pembuatan bank tanah dan memperbaiki sistem jaringan irigasi sawah dan pencetakan sawah baru.

Penelitian ketiga dari Nur Kumalasari (*Program SI Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Malang 2016*) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pertambangan Pasir Di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebijakan pemerintah merupakan faktor yang paling mempengaruhi responden untuk alih fungsi lahan, dengan sub faktor tidak adanya bantuan sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas. Adanya alih fungsi lahan memberikan dampak positif dan negatif bagi petani dan masyarakat sekitar. Dampak positif yang ditimbulkan diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Namun, banyaknya truk-truk pasir yang melintasi jalan desa juga memberikan dampak negatif yaitu menyebabkan polusi udara dan kerusakan jalan. Sehingga dengan adanya dampak tersebut beberapa masyarakat melakukan penutupan beberapa jalan sebagai

antisipasi kerusakan jalan yang semakin parah, serta masyarakat menarik kontribusi untuk truk pasir dari luar kota yang melintasi jalan tersebut.<sup>8</sup>

Ketiga penelitian terdahulu diatas merupakan rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, ketiganya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa persamaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Adanya perubahan rata-rata pendapatan total petani sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan.
2. Faktor yang mempengaruhi petani atau pemilik lahan untuk mengalih fungsikan lahan pertanian.

Adapun perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, pada penelitian Penty Gustikasari terfokus pada dampak yang diakibatkan setelah pengalih fungsian lahan terhadap kehidupan rumah tangga, penelitian Rifal Laksmna terfokus pada analisis dampak terhadap ketahanan pangan setelah pengalih fungsian lahan pertanian, dan penelitian di lakukan oleh Nur Kumalasari terfokus pada faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan petanian, Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada kondisi kesejahteraan keluarga petani yang diakibatkan pengalih fungsian lahan pertanian menjadi kawasan wisata.

---

<sup>8</sup> Nur Kumalasari. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pertambangan Pasir Di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri. Universitas Muhammadiyah Malang

## **B. Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Permintaan lahan untuk sektor diluar pertanian dapat dikatakan jauh lebih menguntungkan. Selama pembangunan masih berlangsung serta meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka pengalih fungsian lahan pertanian akan sangat sulit untuk dihindari, begitupun dengan kebutuhan akan lahan yang terus mengalami peningkatan. Adapun faktor yang mempengaruhi konversi adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, serta jumlah petani yang menurun.<sup>9</sup>

Alih fungsi lahan pada dasarnya adalah proses yang tidak dapat dicegah. Hal penting dalam proses alih fungsi lahan adalah pengendalian, perencanaan dan pengawasannya. Alih fungsi lahan yang harus dicegah adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tidak terencana sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik dalam perspektif jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Untuk mencapai proses alih fungsi yang terkendali dan terencana perlu ditingkatkan keterpaduan yang berbeda untuk tingkat pusat, daerah dan desa. Di samping itu perlu dikembangkan keterpaduan berbagai pihak lain, seperti pihak swasta dan masyarakat lainnya. Sebelum keterpaduan dicapai harus diperjelas dulu mengenai fungsi, tujuan dan sasaran upaya keterpaduan.<sup>10</sup>

Proses alih fungsi lahan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perubahan yang dimaksud tercermin dengan adanya (1) pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber

---

<sup>9</sup> Tri Lestari. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

<sup>10</sup> Utomo *et al.* 1992. Alih Fungsi Lahan: Tinjauan Analisis dalam Makalah Seminar Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung, Lampung.

daya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan perkapita; serta (2) adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam ke aktivitas sektor-sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Menurut hukum ekonomi pasar, konversi lahan berlangsung dari aktivitas dari *land rent* yang lebih rendah ke aktivitas-aktivitas dengan *land rent* yang lebih tinggi. *Land rent* dapat diartikan sebagai nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaatan lahan persatuan luas lahan dan waktu tertentu.<sup>11</sup>

Konversi lahan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. konversi secara langsung terjadi akibat dari keputusan para pemilik lahan yang memanfaatkan lahan sawahnya untuk ke penggunaan lain di sektor non pertanian maupun untuk pertanian lahan kering. Penggunaan lahan setelah dimanfaatkan untuk keperluan non pertanian memiliki nilai jual/sewa yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan lahan yang di manfaatkan untuk sawah, motif ekonomi merupakan pendorong terjadinya konversi dalam kategori ini. Terisolirnya petak-petak sawah di pinggiran perkotaan karena konversi lahan di sekitarnya merupakan salah satu contoh konversi tidak langsung. Konversi yang terjadi secara tidak langsung ini terjadi akibat semakin menurunnya kualitas lahan sawah atau semakin rendahnya peluang dalam memperoleh pendapatan dari lahan pertanian sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Dalam jangka waktu tertentu lahan sawah yang dimaksud akan berubah ke penggunaan non pertanian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi. 2012. Penyelamatan Tanah, Air, Dan Lingkungan. Bogor: Crestpent Press. Hal: 78

<sup>12</sup> Gatot. 2016. Lahan dan Kedaulatan Pangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.47

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Fungsi Lahan**

Umumnya permintaan komoditas non pertanian jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan permintaan pada komoditas pertanian terutama komoditas pangan yang kurang menguntungkan terhadap pendapatan. Permintaan akan lahan yang terus mengalami kenaikan dengan laju yang begitu cepat untuk kegiatan diluar pertanian merupakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan. Walaupun secara kualitas sumber daya lahan dapat ditingkatkan, tetapi secara kuantitas sumber daya lahan yang tersedia di setiap daerah praktis tetap. Pada kondisi keterbatasan tersebut, akan mengurangi ketersediaan lahan untuk pertanian dan meningkatkan kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, pembangunan prasarana ekonomi umum, fasilitas sosial, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi cenderung merangsang terjadinya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, terutama di daerah dengan kelangkaan lahan tinggi karena pembangunan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk sektor non pertanian dengan laju yang lebih besar jika dibandingkan permintaan lahan untuk sektor pertanian. Dengan demikian kelangkaan lahan, dinamika pembangunan, dan pertumbuhan penduduk merupakan tiga faktor dasar yang berkaitan dengan proses alamiah terjadinya konversi lahan sawah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani adalah sebagai pilihan alokasi sumber daya melalui transaksi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak tanah, harga tanah dan lokasi tanah. Sehingga diperlukan kontrol agar sesuai dengan Rencana

Tata Ruang.<sup>13</sup> Berikut uraian beberapa faktor penyebab konfersi lahan yang diambil secara umum dari beberapa kasus.

### 1. Faktor Ekonomi

Secara ekonomi konversi lahan yang dilakukan petani/pemilik lahan baik yang melalui transaksi penjualan kepada pihak lain atau mengganti pada usaha dibidang non pertanian merupakan suatu keputusan yang rasional. Sebab dengan mengambil keputusan tersebut petani berekspektasi total pendapatannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang akan mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, menunjukkan bahwa penggunaan lahan sawah untuk penanaman padi sangat rendah jika dibandingkan penggunaan untuk sektor non pertanian seperti pariwisata, perumahan dan industri.

Konversi lahan sawah kepenggunaan lain diluar sektor pertanian dapat terjadi tanpa melalui transaksi. Konversi lahan yang terjadi di Pulau Jawa di pengaruhi oleh harga jual lahan, sedangkan konversi yang terjadi tanpa melalui transaksi jauh lebih sedikit.<sup>14</sup> Kebutuhan hidup yang terus mengalami peningkatan, lahan pertanian yang berada di kawasan industri, serta harga jual lahan yang terus mengalami peningkatan disinyalir sebagai

---

<sup>13</sup> Misbahul Munir. 2008. Hubungan Antara Konversi Lahan Pertanian dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. Skripsi. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor

<sup>14</sup> Sumaryanto, dkk. 1996. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Pelestarian Swasembada Beras Dan Sosial Ekonomi Petani. Dalam Prosiding Lokakarya "Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air": Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 92-112. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.



alasan petani mengalih fungsikan lahan. Sehingga pajak lahan yang tinggi cenderung mendorong petani untuk melakukan konversi.

Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harga jual lahan yang diterima petani dalam proses alih fungsi lahan secara signifikan dipengaruhi oleh status lahan, jumlah tenaga kerja yang terserap di lahan tersebut, jarak dari saluran tersier, jarak dari jalan, dan jarak dari kawasan industri atau pemukiman.<sup>15</sup>

Aktivitas ekonomi di Indonesia secara makro membutuhkan pemakaian lahan, diantaranya lahan sawah. Agar laju konversi dapat menjadi positif maka harus diimbangi dengan pencetakan lahan pertanian baru yang dapat dilakukan di luar Pulau Jawa. Keterbatasan dana pemerintah untuk mencetak lahan baru merupakan faktor penyebab yang mendorong konversi semakin besar.

Temuan yang menarik adalah bahwa pertumbuhan nilai tukar petani berhubungan negatif dengan rata-rata konversi lahan sawah. Hasil penelitian sebelumnya pada lingkup makro sama dengan hasil ini. Para petani sudah tidak mendapatkan intensif dari usaha pada komoditas pangan khususnya padi. Adapun yang mendorong petani untuk menjual atau mengalih fungsikan lahan sawah dan beralih keusaha lain di sektor non pertanian adalah karena daya saing produk pertanian dan harga lahan yang cenderung terus mengalami peningkatan.

---

<sup>15</sup> Erizal Jamal. 2001. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Lahan Sawah pada Proses Alih Fungsi Lahan ke Penggunaan Non Pertanian: Studi Kasus di Beberapa Desa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 19 Nomor 1:45-63. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

## 2. Faktor Sosial

Perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat merupakan lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Dua faktor yang terakhir berhubungan dengan sistem pemerintahan. Dengan asumsi pemerintah sebagai pengayom dan abdi masyarakat, seharusnya dapat bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan.<sup>16</sup> Oleh karena itu kedua faktor tersebut tidak di urai lebih lanjut dalam tulisan ini.

### a. Perubahan Perilaku

Sistem transportasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat seperti sekarang ini telah membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap dunia luar. Bahkan muncul persepsi, terutama bagi generasi muda di pedesaan terhadap profesi petani, yaitu bekerja sebagai petani adalah pekerjaan yang kotor, sengsara dan kurang bergengsi, hal ini tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat perkotaan. Citra petani dibenak mereka semakin menurun akibat cara pandang tersebut. Petani atau pemilik lahan tidak akan merasa keberatan jika lahan mereka dialih fungsikan ke penggunaan pada sektor-sektor non pertanian. Hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka jadikan sebagai aset ekonomi ataupun modal jika mereka

---

<sup>16</sup> Roso Witjaksono. 1996. Alih fungsi Lahan: Suatu Tinjauan Sosiologis. Dalam Prosiding Lokakarya "Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air": Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 113-120. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.

ingin bekerja di luar sektor pertanian. Sehingga untuk saat ini lahan pertanian bukanlah sebagai aset sosial semata.

b. Hubungan Pemilik dengan Lahan

Bagi petani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dikuasainya jika hanya mengandalkan kehidupan dan penghidupannya pada usaha tani. Mereka tidak berani menanggung resiko atas ketidak pastian penghidupannya sesudah lahan pertaniannya dilepas pada orang lain. Disamping itu, luas kepemilikan lahan masih di kaitkan dengan status sosial penduduk pedesaan. Petani yang memiliki lahan pertanian yang luas dapat memberikan pekerjaan pada tetangganya. Meskipun dalam status yang berbeda, petani dan buruh tani memiliki ikatan hubungan kekeluargaan yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini, untuk mempertahankan kehormatan keluarga, lahan pertanian digunakan sebagai aset sosial bagi pemiliknya. Lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial seperti ini tidak mudah tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang meskipun jumlahnya memadai.

c. Pemecahan Lahan

Faktor sosial lainnya adalah adanya sistem waris. Sistem waris dapat menyebabkan kepemilikan lahan yang semakin menyempit. Lahan pertanian yang sempit disamping pengelolaanya yang kurang efisien juga hanya memberikan sedikit kontribusi bagi pendapatan keluarga petani pemiliknya. Biasanya petani akan beralih mencari pendapatan baru di bidang non pertanian dan tidak lagi mengandalkan penghidupannya dari bidang pertanian. Untuk itu mereka membutuhkan modal atau dana yang

diperoleh dengan cara menjual lahan pertaniannya. Banyak juga lahan yang digunakan untuk pemukiman sebagai akibat pengembangan keluarga melalui perkawinan setelah petani mewariskan lahan tersebut kepada anaknya.

Lembaga perkawinan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat petani di pedesaan merupakan bentuk lain yang berhubungan dengan pemecahan lahan. Terbentuknya keluarga baru biasanya dibekali dengan lahan oleh masing-masing pihak orang tua suami dan istri untuk digabungkan menjadi milik bersama. Permasalahannya adalah letak kedua lahan tersebut cenderung terpisah, sehingga pemilik akan sulit dalam mengendalikan dan kurang efisien dalam pengelolaannya. Kedua kondisi tersebut akan mendorong pemilik untuk menjual sebagian dari lahan tersebut.

Adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi semakin luas. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat jumlah lahan pertanian di Indonesia semakin terbatas, sementara jumlah produksi pangan setiap tahun semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

#### **D. Dampak Alih Fungsi Lahan**

Terkonsentrasinya pembangunan baik infrastruktur, perumahan maupun industri di berbagai daerah di Pulau Jawa mengakibatkan terjadinya pengalih fungsian lahan pertanian. Di satu sisi dengan adanya konversi lahan ini membuka peluang dalam hal lapangan pekerjaan di sektor-sektor non-pertanian, namun di sisi lain akan menimbulkan dampak negatif yang cenderung kurang menguntungkan.

Secara umum konversi lahan pertanian mempunyai konsekuensi:<sup>17</sup>

1. Dampak langsung terhadap hilangnya lahan pertanian yang mempengaruhi produksi pertanian, dimana dampak ini akan menghilangkan pekerjaan di bidang pertanian bagi petani pemilik meupun penggarap, menghilangkan investasi pada infrastruktur pertanian, serta berdampak negatif terhadap lingkungan.
2. Dampak tidak langsung pada penduduk yang datang dari perkotaan ke daerah pedesaan, dimana dampak ini akan meningkatkan pembangunan perumahan dan kesempatan pekerjaan, serta akan merubah struktur sosial ekonomi di pinggiran kota.

Selain dampak yang telah dikemukakan diatas, dengan adanya pengalih fungsian lahan pertanian ke non-pertanian akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Ini disebabkan karena kurangnya daerah resapan air yang ditimbulkan akibat banyaknya pembangunan bangunan-bangunan dilahan yang tadinya merupakan lahan pertanian.

#### **E. Konsep Pariwisata**

Secara etymologis kata “pariwisata” berasal dari bahasa Sansekerta, *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, sedangkan *Wisata* berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sama dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata “pariwisata” seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari satu tempat ke

---

<sup>17</sup> L.D. Rohmadiani. 2011. Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pertanian (Studi Kasus : Jalur Pantura Kecamatan Pemanukan Kabupaten Subang) Jurnal Teknik Vol. 09 No. 02-Juli-2011-ISSN : 1412-1867

tempat yang lainnya, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “tour”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourisme” atau “tourism”.<sup>18</sup>

Pariwisata mengandung kata kunci “perjalanan” (*tour*) yang dilakukan seseorang, yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Jika pada awalnya kegiatan melancong adalah untuk kesenangan belaka, kini kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dinikmati secara serius, yang kemudian mengakibatkannya menjadi tidak lagi sederhana.<sup>19</sup>

Batasan-batasan dalam pariwisata hendaknya memperlihatkan hubungan dari gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: Manusia, yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata; Ruang, yaitu daerah atau tempat melakukan perjalanan wisata; dan Waktu, yaitu waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.<sup>20</sup>

Meskipun begitu, kenyataan bahawa pariwisata pada awalnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi, dan tujuan utama perkembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah (negara).<sup>21</sup>

Pariwisata merupakan salah satu bentuk industri baru yang bisa membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan standar hidup masyarakat dengan

---

<sup>18</sup> Oka A Yoeti. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa. Hal: 112

<sup>19</sup> I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diart,. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset. Hal: 12

<sup>20</sup> Oka A. Yoeti, *Opcit.*, hal:116

<sup>21</sup> I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Andi Offset. Yogyakarta.

cepat. Selain itu pariwisata akan mendorong sektor-sektor lainnya yang berkaitan seperti transportasi, penginapan (yang merupakan industri klasik), sehingga nantinya akan menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Disebutkan pula pariwisata akan membawa pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan mempertahankan eksistensi pariwisata itu sendiri. Seperti perbaikan jalan, penerangan, penyediaan air, pelabuhan dan sebagainya yang seluruhnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.<sup>22</sup>

## **F. Faktor Penarik dan Pendorong Pertumbuhan Pariwisata**

### **1. Faktor Penarik**

Menurut Weaver & Lowton faktor penarik didefinisikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat membantu untuk merangsang sebuah produk wisata dengan menarik konsumen kepada suatu destinasi tertentu Sub faktor yang termasuk dalam faktor penarik adalah:<sup>23</sup>

- a. Aksesibilitas. Sarana dan infrastruktur yang baik seperti transportasi, telepon umum, ketertiban jalan raya, trotoar untuk pejalan kaki dan lain-lain dapat menjadi faktor penarik utama bagi wisatawan dalam memilih negara destinasi.
- b. Ketersediaan jasa atau *service*. Kesuksesan suatu produk pariwisata seringkali bergantung pada ketersediaan atas fasilitas-fasilitas jasa, seperti akomodasi, makanan dan minuman, *travel agency*, Souvenir, iklan media masa dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> Salah Wahab. (1996). Manajemen Kepariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>23</sup> Giva Pavule. 2006. Internasional Tourism Market for Camping Sites in Latvia. Bournemount University. Hochschule Heilbronn. Hal: 27

- c. Budaya. Berdasarkan Mc Intosh, salah satu dari empat motivasi berpergian adalah budaya, yang berarti keinginan untuk memperoleh keinginan untuk memperoleh pengetahuan negara lain, seperti musik, seni, tari, cerita rakyat dan agama. Sedangkan Ross berpendapat wisatawan ingin mencari pengalaman lain dalam hal budaya yang mana berhubungan dengan budaya mereka sendiri.
- d. Stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan suatu daerah atau negara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan negara destinasi.
- e. Ketersediaannya atraksi. Kemampuan suatu destinasi untuk menarik konsumen bergantung oleh beberapa faktor, seperti kualitas, kuantitas, keanekaragaman, keunikan dari suatu atraksi atau hiburan dalam Weaver & Lowton. Ketersediaan suatu atraksi merupakan bagian yang vital untuk menciptakan permintaan pariwisata karena atraksi-atraksi adalah suatu produk yang di jual kepada pengunjung.

Wisatawan membuat keputusan bertindak didasari saat melakukan kunjungan di tempat asal maupun saat memilih lokasi wisata dan semuanya didasari oleh motivasi wisatawan saat berkunjung ke suatu tempat. Motivasi merupakan kebutuhan dan keinginan yang merupakan faktor pendorong untuk melakukan perjalanan. Sedangkan keputusan berkunjung wisatawan yaitu bagaimana wisatawan memandang suatu masalah atau kebutuhan dan bagaimana motivasi yang muncul dalam dirinya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Morrisan. 2007. Perilaku Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Ramdina Prakarsa. Hlm: 68



## 2. Faktor Pendorong

Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pariwisata, berbagai faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata yaitu:<sup>25</sup>

1. Escape. Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang di rasakan menjemukan, atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.
2. Relaxation. Keinginan untuk rekuperasi/penyegaran, yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape diatas.
3. Play. Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan yang merupakan pemunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan kembali diri sejenak dari berbagai urusan yang serius.
4. Strengthening family bonds. Ingin mempererat hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks VFR (Visiting Friends and Relations) keakraban hubungan kekerabatan ini terjadi di antara anggota keluarga yang melakukan perjalanan bersama-sama, karena kebersamaan sangatlah sulit diperoleh dalam suasana kerja sehari-hari di negara industri.
5. Prestige. Untuk menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau derajat sosial. Bagi berbagai masyarakat, perjalanan keluar merupakan salah satu bentuk “inisiasi”.
6. Social interaction. Untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat, atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi.

---

<sup>25</sup> I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri. *Opcit.*,

7. Romance. Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis, atau untuk memenuhi kebutuhan seksual, khususnya dalam pariwisata seks.
8. Educational opportunity. Keinginan untuk melihat sesuatu yang baru. Mempelajari orang lain dan/atau daerah lain, atau mengetahui kebudayaan etnis lain. ini merupakan pendorong yang dominan di dalam pariwisata.
9. Self-fulfilment. Keinginan untuk menemukan diri sendiri (self-discovery), karena diri sendiri bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.
10. Wish-fulfilment. Keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi, yang lama dicita-citakan, sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat, agar bisa melakukan perjalanan. Hal ini juga sangat jelas dalam perjalanan wisata religius, sebagai bagian dari keinginan atau dorongan yang kuat dari dalam diri.

#### **G. Dampak Pariwisata**

##### **1. Dampak Sosial Ekonomi**

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja
- d. Dampak terhadap harga-harga

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal: 109

- e. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
- f. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol
- g. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya
- h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Di samping sebagai dampak yang dinilai positif, namun pada kenyataannya industri pariwisata juga menimbulkan dampak negatif seperti semakin memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumberdaya ekonomi, munculnya neo-kolonialisme dan neo-imperialisme, dan sebagainya.<sup>27</sup>

#### **H. Konsep Kesejahteraan Sosial**

Pengertian kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil spiritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>28</sup>

Kesejahteraan sosial menurut walter A. Friedlander dalam bukunya yang berjudul *introduction to social welfare*, mengemukakan konsep kesejahteraan sosial, konsep tersebut dikembangkan sehubungan dengan masalah sosial masyarakat yang industrial. Konsep tersebut sebagai berikut: <sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal: 113

<sup>28</sup> Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Refika aditama. Hal: 39-40

<sup>29</sup> Mohammad Suud. 2006. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka

*“kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.”*

Jadi kesejahteraan sosial secara umum dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar seperti papan, sandang, pangan, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut maka seseorang berada pada tingkat sejahtera. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## **I. Kesejahteraan Keluarga**

Undang-undang nomor 52 tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan tahapan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang didasarkan atas:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. “Batasan dan Pengertian MDK”. (online) <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> (diakses 20 November 2017)

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI), yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*develomental needs*) dari keluarga.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III plus (KS III plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi seluruh dari 6 (enam) indikator tahap KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III plus.

## J. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

Menurut BKKBN ada 4 (empat) Indikator tahapan keluarga sejahtera, yaitu:<sup>31</sup>

a. Enam indikator tahapan keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah setiap anggota keluarga memiliki pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga dalam kegiatan hidup yang berbeda setiap harinya tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama.

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

---

<sup>31</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Ibid.*,

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/ Badan POM).

5. Bila pasangan subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Pengertian sarana pelayanan kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (hanya untuk keluarga yang berstatus pasangan usia subur).

6. Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian semua anak usia 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun) yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

b. Delapan indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological need) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama/ kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/ anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing agama/ kepercayaan.

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota makan daging/ ikan/ telur.

Pengertian makan daging/ ikan/ telur adalah makan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/ bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli tau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat.



4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.

Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup>.

5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing.

Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing didalam keluarga.

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah didalam keluarga paling kurang ada salah satu anggota keluarga yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus menerus.

7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.

Pengertian anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin adalah anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

8. Pasangan subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/ obat kontrasepsi.

Pengertian pasangan subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/ obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

- c. Lima indikator keluarga sejahtera III (KS III) atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.

2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-

3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi atau bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga .

4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Pengertian keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat disekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ tv/ internet.

Pengertian keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/ tv/ internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjam atau dimiliki oleh orang/ keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/ milik bersama.

- d. Dua indikator keluarga sejahtera III plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*), dari 21 indikator keluarga yaitu:

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

Pengertian keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan suka rela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan-kegiatan ditingkat RT/RW/ Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ isntitusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ isntitusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial masyarakat dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/ kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, intitusi masyarakat, pengurus RT/RT, LKMD/LMD dan sebagainya).

#### **K. Kerangka Pemikiran**

Masalah kemakmuran yang sebagian di rasakan oleh masyarakat yang masih menggantungkan penghidupannya pada bidang pertanian sangat erat kaitannya dengan penguasaan dan kepemilikan lahan.

Adapun pola penguasaan lahan yang ada sekarang ini dinilai cukup timpang. Dimana banyak lahan yang begitu luas dikuasai oleh para pemilik modal sedangkan petani yang miskin akan semakin miskin akibat terpisah dari sumber ekonominya yaitu lahan. Untuk memenuhi permintaan lahan yang terus meningkat, perubahan penggunaan lahan adalah hal yang dapat dilakukan karena jumlah lahan saat ini cenderung tetap.

Kenyataan yang terjadi seiring dengan pertumbuhan pariwisata di Kota Batu yang mengalami peningkatan kebutuhan akan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat, seperti yang terjadi di Desa Beji bahwa lahan pertanian telah mengalami perubahan menjadi kawasan wisata

Jawa Timur Park 3. Dalam penelitian ini pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani untuk mengalih fungsikan lahannya didasari oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan, kondisi lahan dan harga lahan. Petani yang memiliki lahan strategis maka peluang untuk melakukan konversi akan semakin besar, hal ini menjelaskan bahwa kondisi lahan mempengaruhi keputusan petani. Harga jual lahan yang setiap tahun semakin meningkat akan mempengaruhi keputusan petani untuk mengalih fungsikan lahannya dengan harapan dari hasil penjualan lahan tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka dengan cara membelikan lahan baru serta membuka usaha, pengalihfungsian lahan ke sektor non pertanian yang terjadi di Desa Beji akan meningkat apabila kebijakan pemerintah mempermudah dalam pengurusan perizinan untuk mendirikan bangunan dan kebijakan lainnya. Sedangkan faktor sosial yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengkonversi lahannya adalah tingkat pendidikan dan sistem waris.

Tingkat perekonomian dan kondisi sosial petani di Dukuh Ngemplak, Desa Beji dapat dilihat sebagai dampak dari pengalih fungsian lahan. Diduga bahwa terjadinya perubahan kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial petani erat kaitannya dengan pengalih fungsian lahan.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

